

2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Drs.RM.Sosrokartono No. 39

Telpon (0291) 438137
KUDUS 59312

E-mail : satpolpp@kuduskab.go.id

Website : satpolpp.kuduskab.go.id

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan,Tugas pokok & Fungsi.....	2
1.3. Aspek Strategis & Permasalahan Utama	5
1.4. Landasan Hukum.....	8
1.5. Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis.....	15
2.2. Perencanaan Kinerja.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja	21
2.4. Instrumen Pendukung	23
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	33
3.3. Analisis Capaian Sasaran	19
3.4. Permasalahan dan Solusi	43
3.5. Realisasi Anggaran	44
3.6. Akuntabilitas Keuangan	50
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Rencana tindak lanjut	51
LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Perjanjian Kinerja	
Rencana Kerja Tahunan	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

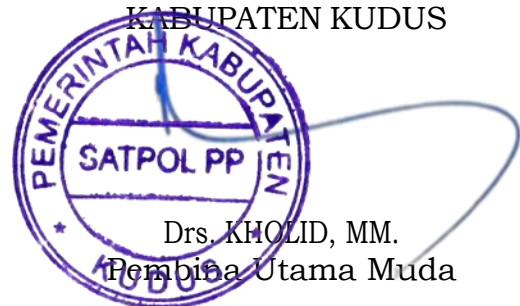
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Kudus, 31 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS



Drs. KHOLID, MM.
Pemula Utama Muda
NIP. 19650130 199203 1 005

BAB I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Melalui peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, dinas daerah, badan/fungsi penunjang, dan staf pendukung.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan tersebut di atas selanjutnya ditindaklanjuti di setiap daerah kabupaten/kota, dimana untuk Kabupaten Kudus ditindaklanjuti melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. *Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat merupakan urusan*

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah, dan berkaitan dengan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara).

Adapun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus. Di dalam Bab VIII Pasal 151 s.d pasal 178 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

Dalam pelayanan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perlindungan masyarakat yang berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbgaidukungan dan hambatan yang akan timbul.

1.1 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

1.1.2 Kedudukan

Satpol PP Kabupaten Kudus berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari:

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 4) Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan
- 5) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- 6) Kepala Seksi Penyelenggaraan Ketertiban Umum
- 7) Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
- 8) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
- 9) Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
- 10) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- 11) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- 12) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
- 13) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran
- 14) Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Seksi- seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sedangkan bagan organisasi Satpol PP Kabupaten Kudus dapat

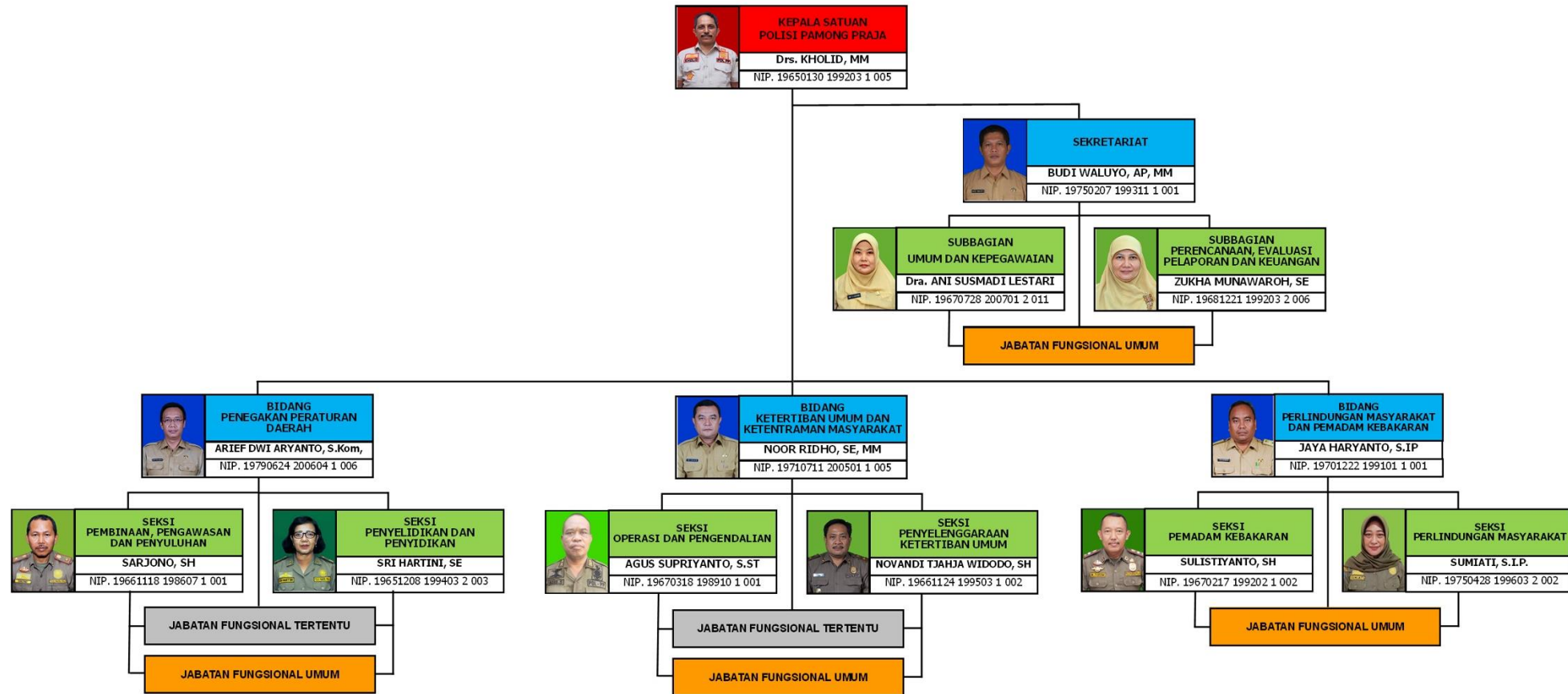
Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- e. pengendalian dan pelaporan bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- f. pelaksanaan administrasi dinas bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan satuan polisi pamong praja.
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis.
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun susunan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus secara lengkap sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS



1.1.4 Isu Strategis & Permasalahan Utama

Dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah, peningkatan kamtibmas, Satpol PP dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia anggota Pol PP baik kualitas maupun kuantitasnya.
2. Masih kurangnya PPNS Penegak Perda
3. Banyaknya kerawanan gangguan tibus tranmas
4. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda
6. Masih kurang diberdayakannya Sumber Daya Manusia anggota Linmas dan banyak yang sudah tua
7. Masih perlu ditingkatkannya Penanganan kebakaran
8. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran.

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strengths)

- SDM tersedia
- Adanya dana anggaran
- Tersedianya sarpras
- Adanya program kerja tahunan
- Tersedianya data
- Tersedianya ruang kantor
- Kesempatan koordinasi luas
- Kesempatan diklat Satpol pp luas dan terbuka

1. Kelemahan (Weaknesses)

- Kualitas dan kuantitas tenaga operasional kurang
- Manajemen perencanaan kurang
- Rekrutmen personil Satpol PP yang tidak sesuai ketentuan
- PPNS belum berfungsi secara maksimal

Dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, maka harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Penetapan ini dilakukan dengan penghitungan kriteria umum (20%) yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur dan kinerja khusus (80%) yang terdiri dari klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Berdasarkan perhitungan indikator-indikator di atas diperoleh skor dari kriteria umum adalah 104, jumlah skor dari kriteria teknis adalah 620, maka total skor adalah 724, yang berarti idealnya jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS. Hingga Tahun 2023,

jumlah personil adalah sejumlah 140 orang, dengan konfigurasi seperti yang terlihat dari tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
2	Sekretariat	1
3	Kepala Bidang	3
4	Ka. Subbag/ Ka. Sie	8
5	JFT	17
6	JFU	17
7	Pegawai Honorer Daerah	3
8	Tenaga Kontrak Perorangan	90
	JUMLAH	140

Tabel 1.1.2
Data Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	17
3	II	22
4	I	1
5	Pegawai Honorer Daerah	3
6	Tenaga Kebersihan	2
7	Tenaga Kontrak Perorangan	90
	JUMLAH	140

Tabel 1.1.3
Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	3
2	S1/D. IV	37
3	D3	1
4	SLTA/Sederajat	94
5	SLTP/Sederajat	3
6	SD	2
	JUMLAH	140

Tabel 1.1.4
Data Pegawai per Bidang

No	Bidang	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	15	5	20
2	Bidang Tibum Tranmas	68	4	72
3	Bidang Gakda	7	4	11

4	Bidang Linmas Damkar	31	5	36
	Jumlah	12 1	18	13

Selain personil dari dalam Satpol PP, untuk melaksanakan tugas menciptakan keamanan ketertiban di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, menegakkan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat, Satpol PP dibantu oleh 4,244 orang anggota Linmas Inti Kecamatan dan Linmas Desa (akhir Tahun 2023) yang tersebar di 9 Kecamatan.

A. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan ketugasan dan fungsinya, Satpol PP sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, baik di dalam kantor maupun di lapangan. Berikut disajikan beberapa tabel yang memuat data tentang sarana dan prasana yang saat ini dimiliki (data sampai dengan akhir tahun 2023).

Tabel 1.2
Jumlah Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Mini Bus	5
2	Patwal	1
3	Pick Up	2
4	Mobil Patroli	3
5	Kendaraan OPS Psikotik (Truk)	1
6	Mobil Pemadam Kebakaran	4
7	Sepeda Motor	23

Tabel 1.2.1
Sarana Perkantoran

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Filling Cabinet	21
2	Brankas	1
3	Meja Kerja	53
4	Kursi Kerja	103
5	Megaphone	7
6	Telephone/fax	1
7	Komputer/laptop	42
8	Overhead Projector	0
9	Televisi	4
10	Kamera/Digital Camera/handycam	8
11	Rak	1
12	AC	19
14	Almari Kayu/almari sorok	12
13	Kipas Angin	13
14	Almari besi/Kaca	9
15	Kursi Rapat	54

Tabel 1.2.2
Perlengkapan Operasional

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Detektor Logam	0
2.	Perisai Fiberglass	31
3.	Helm	31
4.	Knopel T/Tongkat PHH	31
5.	Knopel L/Pentungan	31
6.	Senter Lalu-lintas	6
7.	Pesawat HT	38
8.	Pesawat Rig	1
9.	Senjata Laras Pendek/pistol	0
10.	Sarung Pentungan T	0
11.	Helm SAR	0
12.	Masker Air	2
13.	Alat Selam	0
14.	Pelampung Tubuh	0
15.	Kantung Jenazah	0
16.	Snorkel	0
17.	Alat Musik Drum Band/Korsik	3
18.	Tabung APAR	9
19.	Baju Tahan Api	16
20.	Carabiner	0
21.	Masker Oksigen.masker gas	5
22.	Hidran Kebakaran	0
23.	Nozzle	6
24.	Alat Demo Pernapasan/Boneka CPR	0

Tabel 1.2.3
Data Kendaraan Pemadam Kebakaran

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Pemadam kapasitas 1000 liter	0
2	Mobil pemadam kapasitas 1000 liter dengan skylift	0
3	Mobil pemadam kapasitas 4000 liter	1
4	Mobil pemadam kapasitas 5000 liter	1
5	Mobil pemadam kapasitas 6000 liter	0

B. PERMASALAHAN UTAMA

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
2. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan

pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengembangan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

3. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi meliputi :

- a. Belum optimalnya sanksi-sanksi yang dikenakan pada produk hukum daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
- b. Regulasi yang sering berubah – ubah.
- c. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran, sehingga menyebabkan terjadinya program/kegiatan yang kurang atau tidak sesuai dengan targetnya.
- d. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah

Tabel 2.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Sumber Daya Manusia	Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan SDM yang tidak merata • Kurangnya SDM yang menguasai IT
2	Banyaknya gangguan tibumtranmas terhadap kondusifitas daerah di Kabupaten Kudus	Masih banyaknya gangguan tibum tranmas	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum • Kurangnya pemeliharaan tramtibum • Kurangnya Konsolidasi Penanganan Tramtibum
		Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penindakan pelanggar Produk Hukum Daerah Kurang memiliki Efek jera • Masih kurangnya Pembinaan dan dan Pengawasan Pelanggar terhadap pelanggar Produk Hukum Daerah

			<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Pemberdayaan PPNS
		Masih rendahnya kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya ketrampilan anggota Satlinmas • Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Satlinmas • Kurangnya Orientasi Satlinmas dalam pengamanan
		Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tibumtranmas • Kurangnya Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Tramtib • Masih kurangnya kapasitas/kualitas SDM Satpol PP
		Masih kurangnya SDM dan sarana prasarana anggota Damkar	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya ketrampilan anggota Damkar • Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Damkar • Kurangnya orientasi anggota damkar dalam penanganan pemadaman kebakaran Masih kurangnya pos damkar, sarana dan prasarana damkar (truk damkar yang ada sudah berusia tua)

1.4 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Satpol PP Kabupaten Kudus mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218).
 20. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

1.5. Sistematika

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika laporan Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II **Perencanaan Kinerja**

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 s/d 2023, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kudus dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2018 S/d 2023.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja melekat pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu :

1. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018 s/d 2023, yaitu **KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA.**

Dengan mengacu pada Visi tersebut mengandung arti bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta tegaknya Peraturan Daerah, sebagai pengikat hubungan antara anggota / kelompok / lembaga masyarakat.

Beberapa pihak tersebut merupakan rambu/fungsi kontrol perilaku kehidupan masyarakat yang saling terkait satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan, yang kemudian pada akhirnya dituangkan kedalam berbagi pilar tersebut dibawah ini :

a. Pilar Pertama

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara erkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai isi dan jiwa Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi pamong Praja, bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Pilar Kedua

Tegaknya peraturan merupakan sarana terwujudnya nilai kehidupan masyarakat yang taat terhadap aturan demi terwujudnya budaya hidup yang tertib.

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi Pemerintah Kabupaten Kudus yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handa luntuk peningkatan pelayanan publik.
- c. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal.

Perencanaan Kinerja

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kudus untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

a. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus , yaitu : “Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum”.

Tabel 2.1.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas Dan Sejahtera									
Misi:									
a. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.									
b. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.									
c. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.									
d. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Target Tahunan						Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Indeks Rasa Aman	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	70,50		100,00	81,00	100,00		
		Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	60%	55%	50%	40%	40%	30%

b. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. Pelaksanaan operasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Peningkatan perlindungan masyarakat
- d. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- e. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum
- f. Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum
- g. Pemberantasan pita cukai ilegal dan penertiban KTR atau KTM
- h. Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- i. Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- j. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur.
- k. Pemberantasan pita cukai ilegal dan penertiban KTR atau KTM
- l. Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian

kinerja

m. Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan

n. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur

C. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah atau masyarakat agar tercapai tujuan dan sasaran organisasi, sehingga kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Sedangkan Strategi adalah sebuah pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi dalam suatu aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk tercapainya visi dan misi yang telah ditentukan. Selanjutnya beberapa isu strategis di atas dijabarkan lagi dengan menghubungkan dengan alternatif penyelesaian, maka bisa dijabarkan seperti Tabel dibawah ini ;

Tabel 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP

Sasaran	STRATEGI	Kebijakan
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat b. Pelaksanaan operasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat c. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepaladaerah tentang trantibum d. Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepaladaerah tentang trantibum e. Pemberantasan pita cukai ilegal dan penertiban KTR atau KTM 	Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum
Meningkatnya Ketertiban, Keamanandan kenyamanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan perlindungan masyarakat b. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran 	Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja b. Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan c. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur 	Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

D. PROGRAM

Program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kudus yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 ini merupakan serangkaian langkah penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana program dan kegiatan Satpol PP ini juga merupakan bagian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka untuk mewujudkan visi Kabupaten Kudus yaitu Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera. Berikut program dan kegiatan Satpol PP sebagai berikut;

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola kepada Bupati diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2023

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	0,53	Kasatpol PP
2	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat	30%	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83	
4	Meningkatnya ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	25 %	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

NO.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja PD (Satpol PP)	83 Indeks	SEKRETARIS
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD yang Tersusun Sesuai Standart	24 Dokum en	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan PD yang Tersusun Sesuai Standart	12 Dokum en	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelola Umum yang Tersusun Sesuai Standart	12 Dokum en	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PHD	3 Orang	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Kinerja yang dipelihara	37 Unit	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

NO.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	100 %	Kepala Bidang Ketertentaman dan ketertiban Umum
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Penanganan Gangguan Tibumtranmas	100 %	
		Rasio Jumlah Linmas Per RT	1,34 Nilai	
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	85 %	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada	3 Strategi	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Penanganan Kebakaran Kabupaten Cakupan Penyelamatan Korban Kebakaran Kabupaten 	86 % 100 %	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan evakuasi Kebakaran Presentase Aparatur Damkar yg memenuhi Standar Kualifikasi Tingkat Waktu Tanggap (RTR) 	100 % 100 % 7 Menit	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	31 Kejadian	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	482 Obyek	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

NO.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kepala Subbagian Perencanaan , Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
	Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Laporan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji	59 orang / gaji	
	Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
	Pelaksanaan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	

2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporna	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase BMD dalam kondisi baik (Jumlah BMD dalam kondisi baik dibagi total jumlah BMD x 100%)	10 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota"	12 Dokumen	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan"	1 Dokumen	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	40 Unit	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum	1 Dokumen	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	"Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	

4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Kasus	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 Kasus	
5	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	29 Laporan	
6	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	12 Laporan	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
7	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3500 Orang	
8	Pemadaman dan Pengendalian dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Kabupaten / Kota	12 Laporan	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja

LKjIP merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kudus

3.2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel Tersebut

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2023		
		Target	Realisasi	% Capaian 2023
1	Indeks Rasa Aman	0,53	0,98	184,91 %
2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	30%	7,45	200 %
3	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83	57,55	91,08 %
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	25,00	25,00	100,00 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Satpol PP Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata – rata capaian sebesar 144 %

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2018 -2023, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dijalankan yaitu

1. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan dimana untuk merealisasikannya pada tahun 2023

dijabarkan melalui 3 Program. Untuk mengukur capaian kinerja sasaranstrategis tersebut di atas, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian dari target yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari indikator yang telah ditetapkan yaitu :

1. Sasaran Cakupan patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ada 4 Regu Patroli yang terbagi dalam 3 shift dengan jumlah pelanggaran yang tidak tertangani sebanyak 0 dari total pelanggaran 510 sehingga hasil indikator kerjanya sebesar 7,45 atau nilai yang dicapai 200% (Sangat Baik).
2. Sasaran Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dicapai pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebesar 57,55 dari target yang ditentukan sebesar 83 sehingga nilai capaiannya sebesar 91,08% atau Baik.
3. Pada Indikator Tujuan Nilai Indeks Rasa Aman nilai yang diperoleh

sebesar 0,98 dari target yang ditentukan sebesar 0,53 sehingga untuk nilai capainnya sebesar 184,91 %, nilai tersebut diambil dari total indeks rasa aman penegakan peraturan daerah, indeks rasa aman penanganan gangguan tibum tranmas, indeks rasa aman perlindungan masyarakat dan indeks rasa aman penanganan bencana kebakaran

4. Sasaran Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan yang dicapai pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebesar 25 % dari target yang ditentukan sebesar 25 % sehingga nilai capaiannya sebesar 100% atau Baik.

Sehingga secara umum pencapaian sasaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lebih dari 100 % atau Sangat Tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada form 3. Apabila di lihat capaian kinerja sasaran yang telah ditargetkan ternyata melebihi dari yang telah ditetapkan, meliputi :

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Penanganan Gangguan Tibum Tranmas kali Luas Wilayah dibagi Jumlah Penduduk • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Satpol PP
2	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Jumlah Gangguan Tibum Tranmas yang Tidak Tertangani dibagi Jumlah Gangguan Tibum Tranmas selama 1 Tahun dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Satpol PP
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Nilai evaluasi SAKIP Satpol PP • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Satpol PP
4	Meningkatnya ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Siskamling aktif dibagi Jumlah RW dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Satpol PP

3.2.1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus pada tahun 2023, termasuk kategori sangat berhasil.

Perbandingan antara Target, realisasi serta capaian Renstra Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2
 Capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
 Tahun 2019 - 2023

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	0,52	0,84	164.54 %	0.53	0.95	103%	0,53	0.44	83.02%	0.53	0.86	162.26 %	0,53	0,86	184,91 %
2	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat	60 %	41 %	131,67 %	65%	85%	93.7%	50 %	10.00	190.00%	40.00	8.30	186.25 %	40%	7,45%	200%
3	Meningkatnya akuntabilitaskinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70.50	72.55	102,84 %	72.50	74.73	103%	75.00	73.71	99.64%	81.00	75.60	93.33 %	83,00	57,55	91,08 %
4	Meningkatnya ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	25 %	25 %	100 %

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta tugas pembantuan di Kabupaten Kudus, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

3.2.2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target/realisasi Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dibandingkan dengan target Provinsi/Nasional digunakan sebagai tolak ukur apakah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah sudah memenuhi target dari Provinsi/Nasional sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi maupun RPJMN yang dijabarkan di bawah ini :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Kabupaten 2023			Target 2024	
			Target	Realisasi	Capaian	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi Sakip Perangkat Daerah	83,00	57,55	91,08 %		%
2	Meningkatkan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.	Indeks rasa aman	0,53	0,98	184,91 %	-	-
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	30%	7,45	200 %	-	-
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	25%	25%	100%	-	-
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	0	100	-	-
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	0	100	-	-
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	510	100%	100 %	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	44	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	84	95,45%		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15			15 Menit	15 Menit

3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2023) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.2.3.
Capaian Kinerja IKU dibandingkan terhadap Target RPJMD Satuan Polisi pamog Praja Kabupaten Kudus

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Presentase
1	Meningkatkan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.		Indeks rasa aman	0,53	0,98	184,91%
		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai evaluasi Sakip Perangkat Daerah	83,00	57,55	91,08 %
		Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	30%	7,45%	200%
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	25%	25%	100%

Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

3.2.4.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2023) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.2.3.
Capaian Kinerjanya IKU Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya

Tujuan Jangka Menengah	Indikator Tujuan	2022		
		Target Indikator Kinerja 2022	Realisasi Indikator Kinerja 2022	% Capaian 2022
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	0,53	0,86	162,26%
	Rata-rata skala capaian kinerja			162,26% (Sangat Baik)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kudus

Tujuan Jangka Menengah	Indikator Tujuan	2023		
		Target Indikator Kinerja 2023	Realisasi Indikator Kinerja 2023	% Capaian 2023
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	0,53	0,98	184,91 %
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	25 %	25 %	100 %
Rata-rata skala capaian kinerja				142,45% (Sangat Baik)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2022		
		Target Indikator Kinerja 2022	Realisasi Indikator Kinerja 2022	% Capaian 2022
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	40 %	8,30	186,25%
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81	75,06	92,67%
Rata-rata skala capaian kinerja				136,31 % (Sangat Baik)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2023		
		Target Indikator Kinerja 2023	Realisasi Indikator Kinerja 2023	% Capaian 2023
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30 %	7,45	200,00 %
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83	57,55	91,08 %
Rata-rata skala capaian kinerja				145,54 % (Sangat Baik)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kudus

3.2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis Realisasi Kinerja dengan target tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.2.4.
Capaian Analisis Keberhasilan/Kegagalan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Kabupaten 2023			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi Sakip Perangkat Daerah	83,00	57,55	91,08 %	Berhasil	ditingkatkan
2	Meningkatkan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.	Indeks rasa aman	0,53	0,98	184,91 %	Berhasil	dipertahankan
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	30%	7,45	200 %	Berhasil	dipertahankan
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	25%	25%	100%	Berhasil	dipertahankan
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	0	100	Berhasil (Kegiatan berjalan ketika terjadi dampak dari pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada)	dipertahankan
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	0	100	Berhasil (Kegiatan berjalan ketika terjadi dampak dari pelaksanaan Kegiatan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran)	dipertahankan
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	510	100%	Berhasil	dipertahankan
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	44	100%	Berhasil	dipertahankan
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	84	95,45%	Berhasil	dipertahankan
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15			Berhasil	dipertahankan

3.2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas efisiensi Anggaran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas efisiensi Anggaran tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.2.5.
**REALISASI INDIKATOR DAN ANGGARAN PROGRAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Sasaran Strategis	IKU	Program	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 3.718.789.880	Rp 3.196.501.754
			Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 950.152.000	Rp 935.090.646
2	Meningkatnya Ketertiban, Keamanandan kenyamanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketrentaman Masyarakat • Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan 	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 3.718.789.880	Rp 3.196.501.754
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten / Kota	Rp 8.105.597.280	Rp 7.837.879.416

**ANALISIS EFISIENSI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

NO. REK	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGRAN	REALISASI	CAPAIAN%	EFISIENSI
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.105.597.280	7.837.879.416	96,7	3.3
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.865.464	19.461.400	97,97	2.03
X.XX.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.172.234	14.842.800	97,83	2.17
X.XX.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.693.230	4.618.600	98,41	1.59
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.740.082.046	6.504.458.380	96,5	3.5
X.XX.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.680.100.000	6.445.361.680	96,49	3.51
X.XX.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.860.000	54.980.000	98,42	1.58
X.XX.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.122.046	4.116.700	99,87	0.13
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.657.000	173.877.450	95,72	4.28
X.XX.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.300.000	4.292.000	99,81	0.19
X.XX.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.230.000	16.178.000	99,68	0.32
X.XX.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.039.000	3.987.000	98,71	1.29
X.XX.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.770.000	22.353.250	86,74	13.26
X.XX.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.999.700	99,99	0.01
X.XX.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.318.000	122.067.500	96,64	3.36
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.824.000	195.429.000	99,8	0.2
X.XX.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.824.000	195.429.000	99,8	0.2
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.501.500	233.527.733	97,91	2.09
X.XX.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	0
X.XX.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	90.743.500	86.524.235	95,35	4.65
X.XX.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.758.000	145.003.498	99,48	0.52
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.667.270	711.125.453	97,46	2.54
X.XX.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	456.552.200	441.247.529	96,65	3.35
X.XX.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.542.000	14.319.000	98,47	1.53

X.XX.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258.573.070	255.558.924	98,83	1.17
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.718.789.880	3.196.501.754	85,96	14.04
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.298.789.880	2.261.328.304	98,37	1.63
1.05.02.2.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.146.747.000	2.111.969.804	98,38	1.62
1.05.02.2.01.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	25.700.000	25.693.500	99,97	0.03
1.05.02.2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	71.800.000	71.758.000	99,94	0.06
1.05.02.2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.476.410	42.390.000	99,8	0.2
1.05.02.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	6.080.000	5.840.000	96,05	3.95
1.05.02.2.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500.000	146.000	29,2	70.8
1.05.02.2.01.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.100.000	3.100.000	100	0
1.05.02.2.01.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	441.470	431.000	97,63	2.37

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	729.667.270	711.125.453	97,46	2.54
X.XX.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	456.552.200	441.247.529	96,65	3.35
X.XX.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.542.000	14.319.000	98,47	1.53
X.XX.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258.573.070	255.558.924	98,83	1.17
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.718.789.880	3.196.501.754	85,96	14.04
1.05.02.2.01	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.298.789.880	2.261.328.304	98,37	1.63
1.05.02.2.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.146.747.000	2.111.969.804	98,38	1.62
1.05.02.2.01.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	25.700.000	25.693.500	99,97	0.03
1.05.02.2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	71.800.000	71.758.000	99,94	0.06
1.05.02.2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.476.410	42.390.000	99,8	0.20
1.05.02.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	6.080.000	5.840.000	96,05	3.95
1.05.02.2.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	500.000	146.000	29,2	70.80

1.05.02.2.01.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.100.000	3.100.000	100	0.00
1.05.02.2.01.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	441.470	431.000	97,63	2.37
1.05.02.2.01.9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1.945.000	0	0	100.00
1.05.02.2.02	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	<i>1.420.000.000</i>	<i>935.173.450</i>	<i>65,86</i>	<i>34.14</i>
1.05.02.2.02.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.000.000	1.988.000	99,4	0.60
1.05.02.2.02.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	68.000.000	67.891.100	99,84	0.16
1.05.02.2.02.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.350.000.000	865.294.350	64,1	35.90
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN	950.152.000	935.090.646	98,41	1.59
1.05.04.2.01	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>944.152.000</i>	<i>929.090.846</i>	<i>98,4</i>	<i>1.60</i>
1.05.04.2.01.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	944.152.000	929.090.846	98,4	1.60
1.05.04.2.02	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	<i>6.000.000</i>	<i>5.999.800</i>	<i>100</i>	<i>0.00</i>
1.05.04.2.02.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6.000.000	5.999.800	100	0.00
	TOTAL	12.774.539.160	11.969.471.816	93,7	6.30

3.2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Anggaran tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.2.6.
Capaian Analisis program/kegiatan
yang menunjang keberhasilan/kegagalan tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Progam	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi Sakip Perangkat Daerah	91,08 %		Berhasil	
2	Meningkatkan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.	Indeks rasa aman	184,91 %		Berhasil	
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	200 %		Berhasil	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	100%		Berhasil	n
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100		Berhasil (Kegiatan berjalan ketika terjadi dampak dari pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada)	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100		Berhasil (Kegiatan berjalan ketika terjadi dampak dari pelaksanaan Kegiatan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran)	
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%		Berhasil	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%		Berhasil	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	95,45%		Berhasil	
		Waktu tanggap (response time) penanganan	18 Menit		Berhasil	

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Progam	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak
		kebakaran				

3.3. Analisis Capaian Sasaran

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2018 -2023, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dijalankan yaitu

1. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan

Dimana untuk merealisasikannya pada tahun 2023 dijabarkan melalui 3 Program. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Penanganan Gangguan Tibum Tranmas kali Luas Wilayah dibagi Jumlah Penduduk • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Satpol PP
2	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Jumlah Gangguan Tibum Tranmas yang Tidak Tertangani dibagi Jumlah Gangguan Tibum Tranmas selama 1 Tahun dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Satpol PP
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Nilai evaluasi SAKIP Satpol PP • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Satpol PP
4	Meningkatnya ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Siskamling aktif dibagi Jumlah RW dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Satpol PP

Analisis Target dan Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2022-2023

Tujuan Jangka Menengah	Indikator Tujuan	2022		
		Target Indikator Kinerja 2022	Realisasi Indikator Kinerja 2022	% Capaian 2022
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	0,53	0,86	162,26%
	Rata-rata skala capaian kinerja			162,26% (Sangat Baik)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kudus

Tujuan Jangka Menengah	Indikator Tujuan	2023		
		Target Indikator Kinerja 2023	Realisasi Indikator Kinerja 2023	% Capaian 2023
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Indeks Rasa Aman	0,53	0,98	184,91 %
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	25 %	25 %	100 %
	Rata-rata skala capaian kinerja			142,45% (Sangat Baik)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2022		
		Target Indikator Kinerja 2022	Realisasi Indikator Kinerja 2022	% Capaian 2022
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	40 %	8,30	186,25%
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81	75,06	92,67%
	Rata-rata skala capaian kinerja			136,31 % (Sangat Baik)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2023		
		Target Indikator Kinerja 2023	Realisasi Indikator Kinerja 2023	% Capaian 2023
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30 %	7,45	200,00 %
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83	57,55	91,08 %
	Rata-rata skala capaian kinerja			145,54 % (Sangat Baik)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kudus

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)	(%)
1	2			3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUM		100 %	3.718.789.880	3.196.501.754	91,67
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	2.298.789.880	2.261.328.304	98,37
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100 %	1.420.000.000	935.173.450	65,86
2	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		100 %	950.152.000	935.090.646	98,41
a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	944.152.000	929.090.846	98,4

Tabel 3.4.5
Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dan berkualitas	24 Dokumen	19.865.464	19.461.400	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	97,97 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan PD yang akuntabel	12 Dokumen	6.740.082.046	6.504.458.380	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	96,5 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian sesuai standar	12 Dokumen	181.657.000	173.877.450	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	95,72 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Efisien dan efektifnya pengadaan BMD	5 Jenis	195.824.000	195.429.000	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	99,8%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai satandar	3 Orang	238.501.500	233.527.733	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	97,91 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	37 Unit	729.667.270	711.125.453	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	97,46 %

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Jenis	2,221,508,470	2.261.328.304	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	98,37 %
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada	3 Strategi	1.420.000.000	935.173.450	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	65,86 %
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman	2 Layanan	944.152.000	929.090.846	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	98,4%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	"Jumlah Inspeksi	482 Obyek	6,000,000	5.999.800	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	100 %

3.4 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagaimana berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana Pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah melebihi masa pakai
2. Kurangnya Personil PPNS
3. Masih minimnya Kuantitas dan Kualitas Personil Satpol PP, Satlinmas dan Damkar
4. Minimnya Koordinasi dan Kerjasama antar OPD/unit kerja terkait
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini terhadap Bahaya Kebakaran walaupun hanya kecil.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai
7. Masih Kurangnya Jumlah Pos Pemadam Kebakaran

3.5 Realisasi Anggaran

3.2.7. Pagu Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 12.774.539.160,- dan dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 11.969.471.816,- atau (93,7%), serta terdapat efisiensi sebanyak 6,30%.

Tabel 3.6.1.

Pagu dan Realisasi Anggaran tahun

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN DESEMBER 2023						KETERANGAN
			ANGGARAN				FISIK		
			SP2D	%	SPJ	%	TARGET	REALISASI	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.105.597.280	7.837.879.416	96,7	7.837.879.416	96,7	100	100	
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	19.865.464	19.461.400	97,97	19.461.400	97,97	100	100	
X.XX.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.172.234	14.842.800	97,83	14.842.800	97,83	100	100	
X.XX.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.693.230	4.618.600	98,41	4.618.600	98,41	100	100	
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	6.740.082.046	6.504.458.380	96,5	6.504.458.380	96,5	100	100	
X.XX.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.680.100.000	6.445.361.680	96,49	6.445.361.680	96,49	100	100	
X.XX.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.860.000	54.980.000	98,42	54.980.000	98,42	100	100	
X.XX.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.122.046	4.116.700	99,87	4.116.700	99,87	100	100	
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	181.657.000	173.877.450	95,72	173.877.450	95,72	100	100	
X.XX.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.300.000	4.292.000	99,81	4.292.000	99,81	100	100	
X.XX.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.230.000	16.178.000	99,68	16.178.000	99,68	100	100	
X.XX.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.039.000	3.987.000	98,71	3.987.000	98,71	100	100	
X.XX.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.770.000	22.353.250	86,74	22.353.250	86,74	100	100	
X.XX.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.999.700	99,99	4.999.700	99,99	100	100	
X.XX.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.318.000	122.067.500	96,64	122.067.500	96,64	100	100	
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	195.824.000	195.429.000	99,8	195.429.000	99,8	100	100	
X.XX.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.824.000	195.429.000	99,8	195.429.000	99,8	100	100	
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	238.501.500	233.527.733	97,91	233.527.733	97,91	100	100	
X.XX.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	100	100	100	
X.XX.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	90.743.500	86.524.235	95,35	86.524.235	95,35	100	100	
X.XX.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.758.000	145.003.498	99,48	145.003.498	99,48	100	100	
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	729.667.270	711.125.453	97,46	711.125.453	97,46	100	100	

X.XX.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	456.552.200	441.247.529	96,65	441.247.529	96,65	100	100	
X.XX.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.542.000	14.319.000	98,47	14.319.000	98,47	100	100	
X.XX.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258.573.070	255.558.924	98,83	255.558.924	98,83	100	100	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUM	3.718.789.880	3.196.501.754	85,96	3.196.501.754	85,96	100	91,67	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.298.789.880	2.261.328.304	98,37	2.261.328.304	98,37	100	88,89	
1.05.02.2.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.146.747.000	2.111.969.804	98,38	2.111.969.804	98,38	100	100	
1.05.02.2.01.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	25.700.000	25.693.500	99,97	25.693.500	99,97	100	100	
1.05.02.2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	71.800.000	71.758.000	99,94	71.758.000	99,94	100	100	
1.05.02.2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.476.410	42.390.000	99,8	42.390.000	99,8	100	100	
1.05.02.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	6.080.000	5.840.000	96,05	5.840.000	96,05	100	100	
1.05.02.2.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	500.000	146.000	29,2	146.000	29,2	100	100	- Kealpaan dalam perencanaan anggaran tidak mencantumkan biaya rapat. - Konsumsi rapat biaya mandiri - Realisasi anggaran hanya untuk pembelian kertas dan fotocopy (sesuai DPA)
1.05.02.2.01.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.100.000	3.100.000	100	3.100.000	100	100	100	
1.05.02.2.01.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	441.470	431.000	97,63	431.000	97,63	100	100	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN DESEMBER 2023						KETERANGAN
			ANGGARAN				FISIK		
			SP2D	%	SPJ	%	TARGET	REALISASI	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.667.270	711.125.453	97,46	711.125.453	97,46	100	100	
X.XX.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	456.552.200	441.247.529	96,65	441.247.529	96,65	100	100	
X.XX.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.542.000	14.319.000	98,47	14.319.000	98,47	100	100	
X.XX.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258.573.070	255.558.924	98,83	255.558.924	98,83	100	100	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUM	3.718.789.880	3.196.501.754	85,96	3.196.501.754	85,96	100	91,67	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.298.789.880	2.261.328.304	98,37	2.261.328.304	98,37	100	88,89	
1.05.02.2.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.146.747.000	2.111.969.804	98,38	2.111.969.804	98,38	100	100	
1.05.02.2.01.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	25.700.000	25.693.500	99,97	25.693.500	99,97	100	100	
1.05.02.2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	71.800.000	71.758.000	99,94	71.758.000	99,94	100	100	
1.05.02.2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.476.410	42.390.000	99,8	42.390.000	99,8	100	100	
1.05.02.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	6.080.000	5.840.000	96,05	5.840.000	96,05	100	100	

1.05.02.2.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	500.000	146.000	29,2	146.000	29,2	100	100	- Kealpaan dalam perencanaan anggaran tidak mencantumkan biaya rapat. - Konsumsi rapat biaya mandiri - Realisasi anggaran hanya untuk pembelian kertas dan fotocopy (sesuai DPA)
1.05.02.2.01.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.100.000	3.100.000	100	3.100.000	100	100	100	
1.05.02.2.01.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	441.470	431.000	97,63	431.000	97,63	100	100	
1.05.02.2.01.9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1.945.000	0	0	0	0	100	0	Kegiatan berjalan ketika terjadi dampak dari pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
1.05.02.2.02	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotadan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>1.420.000.000</i>	<i>935.173.450</i>	<i>65,86</i>	<i>935.173.450</i>	<i>65,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
1.05.02.2.02.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.000.000	1.988.000	99,4	1.988.000	99,4	100	100	
1.05.02.2.02.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	68.000.000	67.891.100	99,84	67.891.100	99,84	100	100	
1.05.02.2.02.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.350.000.000	865.294.350	64,1	865.294.350	64,1	100	100	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	950.152.000	935.090.646	98,41	935.090.646	98,41	100	100	
1.05.04.2.01	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>944.152.000</i>	<i>929.090.846</i>	<i>98,4</i>	<i>929.090.846</i>	<i>98,4</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
1.05.04.2.01.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	944.152.000	929.090.846	98,4	929.090.846	98,4	100	100	
1.05.04.2.02	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	<i>6.000.000</i>	<i>5.999.800</i>	<i>100</i>	<i>5.999.800</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
1.05.04.2.02.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6.000.000	5.999.800	100	5.999.800	100	100	100	
	T O T A L	12.774.539.160	11.969.471.816	93,7	11.969.471.816	93,7	100	96,88	

3.2.8. Efisiensi Anggaran

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Realisasi APBD dengan capaian kinerja. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel di bawah ini :

Tabel 3.6.3
Efisiensi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

NO. REK	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN%	EFISI ENSI
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.105.597.280	7.837.879.416	96,7	3.3
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.865.464	19.461.400	97,97	2.03
X.XX.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.172.234	14.842.800	97,83	2.17
X.XX.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.693.230	4.618.600	98,41	1.59
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.740.082.046	6.504.458.380	96,5	3.5
X.XX.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.680.100.000	6.445.361.680	96,49	3.51
X.XX.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.860.000	54.980.000	98,42	1.58
X.XX.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.122.046	4.116.700	99,87	0.13
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.657.000	173.877.450	95,72	4.28
X.XX.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.300.000	4.292.000	99,81	0.19
X.XX.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.230.000	16.178.000	99,68	0.32
X.XX.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.039.000	3.987.000	98,71	1.29
X.XX.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.770.000	22.353.250	86,74	13.26
X.XX.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.999.700	99,99	0.01
X.XX.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.318.000	122.067.500	96,64	3.36
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.824.000	195.429.000	99,8	0.2
X.XX.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.824.000	195.429.000	99,8	0.2
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.501.500	233.527.733	97,91	2.09
X.XX.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	0
X.XX.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	90.743.500	86.524.235	95,35	4.65
X.XX.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.758.000	145.003.498	99,48	0.52
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.667.270	711.125.453	97,46	2.54

X.XX.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	456.552.200	441.247.529	96,65	3.35
X.XX.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.542.000	14.319.000	98,47	1.53
X.XX.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258.573.070	255.558.924	98,83	1.17
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.718.789.880	3.196.501.754	85,96	14.04
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.298.789.880	2.261.328.304	98,37	1.63
1.05.02.2.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.146.747.000	2.111.969.804	98,38	1.62
1.05.02.2.01.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	25.700.000	25.693.500	99,97	0.03
1.05.02.2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	71.800.000	71.758.000	99,94	0.06
1.05.02.2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.476.410	42.390.000	99,8	0.2
1.05.02.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	6.080.000	5.840.000	96,05	3.95
1.05.02.2.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	500.000	146.000	29,2	70.8
1.05.02.2.01.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.100.000	3.100.000	100	0
1.05.02.2.01.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	441.470	431.000	97,63	2.37

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	729.667.270	711.125.453	97,46	2.54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	456.552.200	441.247.529	96,65	3.35
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.542.000	14.319.000	98,47	1.53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258.573.070	255.558.924	98,83	1.17
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUM	3.718.789.880	3.196.501.754	85,96	14.04
<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.298.789.880	2.261.328.304	98,37	1.63
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.146.747.000	2.111.969.804	98,38	1.62
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	25.700.000	25.693.500	99,97	0.03

PenangananUnjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatTingkat Kabupaten/Kota	71.800.000	71.758.000	99,94	0.06
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalamrangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.476.410	42.390.000	99,8	0.20
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan PolisiPamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	6.080.000	5.840.000	96,05	3.95
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalamTeknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	500.000	146.000	29,2	70.80
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.100.000	3.100.000	100	0.00
Penyusunan SOP Ketertiban Umum danKetenteraman Masyarakat	441.470	431.000	97,63	2.37
Penyediaan Layanan dalam rangka DampakPenegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1.945.000	0	0	100.00
<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotadan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	<i>1.420.000.000</i>	935.173.450	65,86	34.14
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati/Wali Kota	2.000.000	1.988.000	99,4	0.60
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota	68.000.000	67.891.100	99,84	0.16
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerahdan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.350.000.000	865.294.350	64,1	35.90
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	950.152.000	935.090.646	98,41	1.59
<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>944.152.000</i>	929.090.846	98,4	1.60
Pemadaman dan Pengendalian Kebakarandalam Daerah Kabupaten/ Kota	944.152.000	929.090.846	98,4	1.60
<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	<i>6.000.000</i>	5.999.800	100	0.00
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6.000.000	5.999.800	100	0.00
	12.774.539.160	11.969.471.816	93,7	6.30

3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2023 , Satuan Polisi Pamong Praja Anggaran Belanja sebesar Rp. 12.774.539.160 dalam realisasinya anggaran belanja tersebut terserap sebanyak Rp. 11.969.471.816 atau 93,7 %, sehingga terdapat efisiensi sebanyak 6,3 %. Selain itu juga terdapat Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

NO REKUNING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN DESEMBER 2023				KETERANGAN		
			ANGGARAN		FISIK				
			SP2D	%	SPJ	%	TARGET	REALISASI	
1.05.02.2.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	500.000	146.000	29,2	146.000	29,2	100	100	Kealpaan dalam perencanaan anggaran tidak mencantumkan biaya rapat. - Konsumsi rapat biaya mandiri -

	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								Realisasi anggaran hanya untuk pembelian kertas dan fotocopy (sesuai DPA)
1.05.02.2.01.9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1.945.000	0	0	0	0	100	0	Kegiatan berjalan ketika terjadi dampak dari pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Jika dilihat dari tabel diatas maka Realisasi masih sesuai target yang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi riil , Satuan Polisi Pamong Praja Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 50.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. Rp. 55.075.250,00 atau 100,01 %,kelebihan dari target pendapatan sebesar 0,01 %.selain itu terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 805.067.344 dalam realisasinya anggaran belanja tersebut terserap sebanyak Rp. 11.969.471.816 atau 93,7 %, sehingga terdapat efisiensi sebanyak 6,3 %. Sementara itu, Capaian program dan kegiatan dan capaian fisik sudah mencapai 96,88%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 96,88% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Adapun permasalahan dan solusi yang dapat menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus diantaranya:

1. Terbatasnya kemampuan SDM
2. Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan Satpol PP
3. Terbatasnya anggaran
4. terbatasnya jumlah aparatur.
5. Adanya aturan proses penyusunan laporan kinerja dengan jadwal dan beberapa dokumen disusun dalam waktu yang berhimpitan
6. Jumlah aparat terbatas & sanksi yang ada di regulasi kurang tegas
7. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat agar sadar dan taat pada Perda.
8. Kurangnya Sarana dan prasarana pendukung
9. Regulasi pemanfaatan DBHCHT yang cenderung kaku

B. REKOMENDASI

Guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul maka beberapa Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, adalah :

1. Menambah Sosialisasi Tentang Perda dan Perkada

2. Menambah target output jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi maupun Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Alat Proteksi Kebakaran.
3. Mengadakan pelatihan pada bidang Pencegahan Gangguan Trantibum dan Pemadaman Kebakaran
4. Bekerjasama dengan penyedia barang/jasa yang dapat diandalkan sewaktu-waktu dalam rangka penyediaan logistik barang maupun bahan baku bangunan.
5. Komitmen antar pihak atau Instansi terkait agar Lebih Memperhatikan tentang Gangguan Tibumtranmas dan Kebakaran
6. Memberikan Perhatian lebih Terkait Kesejahteraan Kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target ang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik tuhan yang maha esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kudus, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS



Drs. KHOLID, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650130 199203 1 00

